

# GARIS MASSA DALAM KEPEMIMPINAN

Oleh Nurcholish Madjid

Mendengar apa yang tertera pada judul tulisan ini tentu mengingatkan orang kepada istilah politik di zaman Orde Lama. Hal itu memang tidak dapat terlalu disalahkan, karena salah satu karakteristik kepemimpinan zaman itu ialah kepemimpinan garis massa. Dan topik itu merupakan salah satu pangkal perbedaan pandangan antara dua tokoh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno adalah pengamal yang sangat baik terhadap prinsip kepemimpinan dengan garis massa, dan Bung Hatta adalah sebaliknya senantiasa mengemukakan kelebihan kebaikan sistem kader.

Ditinjau secara lebih mendalam sebetulnya perbedaan antara kedua jenis kepemimpinan itu sejalan dengan perbedaan antara sistem totaliter dan sistem demokratis. Dalam sistem totaliter seorang diktator yang memiliki seluruh kekuasaan menduduki tempat teratas. Meskipun pengertian itu biasanya sudah dianggap tepat dan merupakan titik-tolak pembahasan politik, tetapi senantiasa muncul tantangan terhadap teori itu. Di Uni Soviet umpamanya, bukannya sang diktator, melainkan partailah yang menjalankan kekuasaan mutlak, dan suatu badan yang lebih kecil, yaitu Politburo, memegang kata putus yang terakhir. Sama halnya dengan keadaan sistem-sistem fasis di Jerman dan Itali pada masa lalu. Hitler dan Mussolini hanyalah memegang kekuasaan yang bersifat pengarah, sedangkan kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh sekelompok jenderal, sedangkan kedua diktator itu

semata-mata merupakan alat kelompok tersebut. Tentu saja hal itu masih merupakan bahan studi yang menarik bagi para ahli sejarah. Dan memang bukti-bukti ilmiah masih simpang-siur antara yang menyokong teori tersebut dan teori yang mengatakan bahwa diktator-diktator itulah yang menjalankan kekuasaan mutlak dan sempurna.

Tetapi yang sudah jelas ialah bahwa seorang pemimpin totaliter tentu memerlukan pengikut yang mengelompok, mungkin dalam bentuk partai. Tetapi barangkali perkataan itu akan membingungkan. Sebab pengikutan secara totaliter sangat berbeda dengan jenis kepartaian yang terdapat di negara-negara konstitusional demokratis. Gerakan totaliter secara lahir tampak menerapkan bentuk-bentuk kepartaian itu, tetapi dinamika intinya sangat berlainan. Mereka tidak secara bebas mengumpulkan keanggotaan sebagaimana umumnya dilakukan oleh partai-partai yang demokratis, tetapi mereka menciptakan ukuran-ukuran yang merupakan ciri-ciri suatu perkumpulan yang eksklusif. Bagi PKI umpamanya, ukuran itu ialah latar belakang sosial seorang “calon” anggota, apakah dia berasal dari golongan proletar atau bukan. Jika bukan, sikap yang dikedepankan ialah curiga, dan jika terdapat jaminan-jaminan secukupnya bagi diterimanya menjadi anggota kemudian diciptakan tindakan-tindakan preventif yang ketat. Dalam partai yang totaliter sudah tentu tidak ada demokrasi. Keanggotaan dalam partai itu bahkan tidak menentukan pemilihan pimpinan. Sebab dalam soal kebijaksanaan tergantung kepada “pengarahan” suatu badan otokratik, dan dalam soal kepemimpinan terserah kepada pengawasan hirarkis.

Menurut Max Weber — dengan mengesampingkan pandangan-pandangan normatifnya tentang partai yang demokratis — sebuah partai politik ialah sekumpulan orang yang tersusun secara rapi dengan tujuan memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan atau mempertahankannya, dan dengan tujuan lebih jauh yaitu melalui kekuasaan itu memberi kepada anggota-anggota partai keuntungan-keuntungan ideal dan material. Sedangkan daya pengikatnya yang

terkuat ialah persamaan konsep atau pandangan politik, atau secara lebih luas dapat disebut ideologi. Dalam hal partai komunis umpamanya, jelas pernah mengatakan bahwa kesatuan ideologis merupakan tulang punggung partai komunis yang mengharuskan anggota-anggotanya kesamaan dalam pandangan-dunia dan perkembangan masyarakat.

Dalam keadaan ideologi tidak menemukan kejelasannya, maka bila kekuasaan merupakan tujuan yang secara intensif hendak dicapai dengan ukuran-ukuran pembenaran secukupnya, pandangan-pandangan yang manipulatif dari pihak pimpinan akan sangat menentukan. Kemudian secara psikologis pun dapat diterapkan bahwa jika pemimpin sendiri kurang yakin akan kebenaran pandangan-pandangannya, maka kekhawatiran yang timbul justru akan mendorongnya untuk memaksakan pandangan itu kepada para pengikutnya, yaitu massa. Karena itu, kepemimpinan yang memegang garis massa akan senantiasa eksklusif dan tertutup. Maka dalam mengembangkan demokrasi, kita dituntut untuk lebih berani memperkenalkan jenis kepemimpinan yang demokratis dan terbuka, di mana ide-ide “dilempar ke pasaran bebas”, dan kesempatan massa rakyat untuk “membeli atau menolak” ide itu dijamin secukupnya. Ide tidak dapat disalurkan melalui “koperasi” yang tunggal tanpa saingan, sehingga konsumen mau tidak mau mesti membelinya. *Selling ideas* dengan sistem penjatahan ala koperasi atau komunis — artinya tanpa saingan yang berarti — merupakan ciri suatu kepemimpinan dengan garis massa, suatu keharusan bagi suatu kekuasaan totaliter. Tentu saja kita tidak menghendaknya, sebab justru itulah segi yang paling dikehendaki dari sistem yang hendak diwujudkan oleh PKI dulu. [❖]